

**ANALISIS TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN
INDONESIA DALAM MENGATASI PERIODE *LAME DUCK*
SESSION PADA MASA TRANSISI PASCA
PEMILIHAN UMUM
(Studi Kasus: Produktivitas Legislasi Lembaga Legislatif di Indonesia)**

Muhammad Ulil Absor¹, Muhammad Zaki Mubarrak²

INTISARI

Fenomena *Lame Duck Session* secara umum lazim terjadi di negara-negara dengan sistem Presidensial atau sistem Parlementer, *Lame Duck* dapat dikatakan suatu keadaan dimana pejabat yang tidak terpilih kembali namun masih duduk dalam jabatannya sampai pejabat baru dilantik, fenomena tersebut timbul karena adanya jeda waktu yang cukup lama antara hari pemungutan suara sampai hari pelantikan. Dengan adanya permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aturan khusus, serta strategi politik hukum negara dalam mengatasi dan mengendalikan *Lame Duck Session* pasca pelaksanaan pemilihan umum. Metode yang digunakan penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan hukum dan konseptual yang bersumber dari data sekunder atau data kepustakaan dengan dianalisis secara kualitatif bersifat narasi deskriptif dan perspektif dalam menentukan kesimpulan. Urgensi pengaturan hukum mengenai *Lame Duck Session* di Indonesia perlu diatur khususnya didalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum maupun peraturan-peraturan pelaksanaannya, hal ini dikarenakan belum adanya regulasi secara jelas dibandingkan dengan beberapa negara lain yang sudah dimuat kedalam konstitusi tertinggi. Namun dalam sistem ketatanegaraan, bukan hanya hukum saja tetapi politik atau kekuasaan juga menjadi instrument penting dalam pembentukan dan eksplorasi hukum, khususnya dalam sistem hukum ketatanegaraan untuk mengatasi sebuah fenomena seperti *Lame Duck Session*, perubahan Undang-Undang Dasar menjadi arah strategis dalam mengatasi fenomena *Lame Duck* dengan menerapkan beberapa formula umum didalam substansi konstitusi.

Kata Kunci: *Lame Duck Session, Politik Hukum, Pemilu, Sistem Ketatanegaraan*

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

**ANALYSIS OF INDONESIA'S CONSTITUTIONAL SYSTEM IN
OVERCOMING THE LAME DUCK SESSION PERIOD
DURING THE TRANSITION PERIOD AFTER
THE GENERAL ELECTION
(Case Study: Legislation Productivity of Legislative Institutions in Indonesia)**

Muhammad Ulil Absor¹, Muhammad Zaki Mubarrak²

ABSTRACT

The *Lame Duck Session* phenomenon is generally prevalent in countries with a Presidential system or Parliamentary system, *Lame Duck Session* can be said to be a situation where officials who are not re-elected but still in their positions until new officials are appointed, this phenomenon arises because of the long time lag between the day of voting and the day of inauguration. With these problems, this research aims to find out and analyze the special rules, as well as the political strategy of state law in overcoming and controlling the *Lame Duck Session* after the implementation of the general election. The method used in this research is a type of normative legal research with a statutory approach, comparative law and conceptual approach, which is sourced from secondary data or literature data by analyzing qualitatively descriptive narratives and perspectives in determining conclusions. The urgency of legal arrangements regarding the *Lame Duck Session* in Indonesia needs to be regulated, especially in the 1945 Constitution, Law Number 7 of 2017 about General Election and its implementing regulations, this is because there is no clear regulation compared to some other countries that have been incorporated into the supreme constitutions. However, in the constitutional system, not only law but politics or power is also an important instrument in the formation and exploration of law, especially in the constitutional legal system to overcome a phenomenon such as the *Lame Duck Session*, the amendment of the Constitution is a strategic direction in overcoming the *Lame Duck* by applying several general formulas in the substance of the constitution.

Keyword: *Lame Duck, Politics of Law, General Election, Constitutional System*

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta